

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users”

Menurut Rudianto (2012:15) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”

Menurut Charles T. Hongren dan Walter T Harrison (2013:3) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“ Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates result to decision makers”.

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang Akuntansi ada 8 (delapan) macam yaitu:

- a. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*) adalah bidang Akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporannya yang dihasilkannya bersifat serbaguna.
- b. Akuntansi Manajemen (*Manajemen Accounting*) adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) adalah Akuntansi yang kegiatan utamanya yaitu menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
- d. Akuntansi Pemeriksaaan (*Auditing*) bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat lebih bisa dipercaya secara objektif.
- e. Sistem Akuntansi (*Accounting Sistem*) bidang ini melakukan perancangan dan implementasikan dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Akuntaansi Anggaran (*Budgeting*) bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
- h. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*) adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

Bidang-bidang Akuntansi dibagi menjadi 8 (delapan) macam, dalam penelitian ini bidang Akuntansi yang digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber:

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Bambang Riyanto (2012:327), laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan Finansiil (Financial Statement), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansiil suatu perusahaan, dimana Neraca (Balance Sheets) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun”.

Jadi, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:9), secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. *Balance Sheet* (Neraca)
Balance Sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)
Income Statement (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
 Laporan Perubahan Modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
 Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendaatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
 Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat mamahami jelas data yang disajikan.

2.1.1.5 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2015:207) merupakan upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Harahap (2015:195), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (*implicit*).
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (*rating*).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisa laporan keuangan juga antara lain:
 - a. Dapat menilai prestasi perusahaan.
 - b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.
 - c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu:
 - i. Posisi Keuangan (asset, neraca dan modal)
 - ii. Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya)
 - iii. Likuiditas
 - iv. Solvabilitas
 - v. Aktivitas
 - vi. Rentabilitas dan profitabilitas
 - vii. Indikator pasar modal
 - d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.
 - e. Menilai komposisi struktur keuangan, arus dana
7. Dapat menentukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.
10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang lebih mendalam dari laporan

keuangan terutama informasi yang diinginkan oleh pihak pengambil keputusan serta dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.1.6 Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10)

”Akuntansi Perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu”.

Menurut Waluyo (2012:35) Akuntansi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba atau keuntungan. Manajemen perusahaan sering kali dituntut

untuk mampu mencapai target yang telah direncanakan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang baik.

Sartono (2010:122) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri”.

Munawir (2010:70) menjelaskan profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba”.

Irham Fahmi (2013:135) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh”.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2010:197), adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2010:198), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.1.2.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Irham Fahmi (2013:135) secara umum terdapat empat jenis rasio utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1) *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini mengukur persentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik gross profit margin, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka gross profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya. Gross profit margin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{sales} - \text{cost of good sold}}{\text{Sales}}$$

2) *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena melebihi harga pokok penjualan. Net profit margin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{sales}}$$

3) *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Equity}}$$

4) *Return On Investment (ROI)*

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan maupun memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang diterapkan. Dan investasi tersebut sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. ROI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$$

Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Investment (ROI)*, karena *ROI* paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilai *ROI*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan dalam segi penggunaan Investasi. *ROI* yang besar menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Angka *ROI* dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai $> 2\%$ (lebih dari dua persen).

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 *Definisi Leverage*

Menurut Kasmir (2014:112) mengemukakan pengertian *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.”

Menurut Harjito dan Martono (2014:315) menyatakan bahwa pengertian *leverage* sebagai berikut :

“*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.”

Menurut Hartono (2017:282) pengertian *leverage* adalah :

“*Leverage* didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.”

Dari pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *leverage* adalah mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan dibiayai dengan utang.

2.1.3.2 Jenis-jenis *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:112) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:

1. “*Debt to Total Asset Ratio (DAR)*
Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Debt ratio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang

tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Time Interest Earned Ratio = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan ekuitas sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah ekuitas sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan ekuitas sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Long - Term Debt}{Equity}$$

Dari kelima metode pengukuran *leverage* diatas, penulis mengambil salah satu untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*.

Dipilihnya *debt to total asset ratio* (DAR) sebagai indikator *leverage* untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang ketika mengalami *default*, dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan jaminan menggunakan aset yang dimiliki.

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2010:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan dalam menggunakan rasio *leverage* di antaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dan
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.”

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2010:154) adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya,
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dan
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

2.1.3.4 Keuntungan Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:113) menyatakan bahwa keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

2.1.4 Likuiditas

2.1.4.1 Pengertian Rasio Likuiditas

Likuiditas mencerminkan ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Menurut Arief dan Edi (2016:57) rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.”

Menurut Kasmir (2016:128), rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih.”

Maka dari itu, rasio likuiditas dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau asset lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan perusahaan. Selain itu, adapula tujuan dari perhitungan rasio likuiditas.

Tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kasmir (2016:132), adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.

Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.1.4.3 Pengukuran Rasio Likuiditas

Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang bersifat jangka pendek dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aktiva lancar (*current asset*) dengan hutang lancar (*current liabilities*), perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar biasanya disebut rasio lancar (*current ratio*).

Adapun jenis-jenis rasio likuiditas yang dikemukakan oleh Kasmir (2016:134) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuannya yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.”

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Cepat (*Quick ratio*)
Rasio Cepat rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Artinya, nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini

dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rasio cepat dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan yang ada di bank (yang dapat ditarik setiap saat menggunakan kartu ATM). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rasio kas dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas Atau Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

2.1.4.4 *Current Ratio*

Pemilihan *current ratio* sebagai indikator dalam menentukan tingkat rasio likuiditas karena *current ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Bagi investor sangat penting memperhatikan aset lancar perusahaan karena terdapat akun surat berharga, yang berupa saham dan obligasi yang segera dapat diuangkan atau dijual di bursa efek atau bank.

Menurut Kasmir (2016:134) menyatakan bahwa:

“Rasio lancar atau (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.”

Menurut Sudana (2011:21) adalah :

“*Current ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti semakin likuid perusahaan.”

Current ratio (CR) didapatkan dengan membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas lancar perusahaan. Menurut Alwi dan Sutrisno (2013) *current Ratio* mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi aktiva lancar perusahaan dengan hutang lancarnya. Semakin tinggi *current ratio* berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan likuiditas suatu perusahaan tersebut tinggi. *Current ratio* yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya piutang yang tidak tertagih dan persediaan yang belum terjual, yang tentunya tidak dapat digunakan secara cepat untuk membayar hutang lancarnya. Perusahaan dengan posisi tersebut seringkali tidak terganggu likuiditasnya, sehingga investor lebih menyukai untuk menginvestasikan modalnya melalui pembelian saham perusahaan dengan nilai aktiva lancar yang tinggi. Jadi *current ratio* berpengaruh positif dengan harga saham.

2.1.5 Agresivitas Pajak

2.1.5.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dan Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati (2013:6)

definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:5) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya konstrasepsi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran”.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap Negara yang telah diatur oleh Undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di Negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan nasional kerana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan lain-lain
2. Fungsi *regulated* (pengatur)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
 - b. Wajib pajak bersifat pasif;
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri;
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat jenis-jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.5.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak

terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan tarutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.5.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah faktor pengurang laba (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2013:13) Manajemen Perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah

pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara ilegal yaitu:

1. Penghematan Pajak (tax saving)
2. Penghindaran Pajak (tax avoidance)
3. penundaan Pembayaran Pajak
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan
5. menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

2.1.5.7 Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang sangat umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Christensen dan Murphy, 2004 dalam Jesicca ,2014).

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) adalah:

“...suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif”.

Menurut Balakrishnan, et al. (2011) , agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya. Karena bagi

perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Chen et al. (2010) dalam Boussaidi (2015), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai berikut

“Tax aggressiveness is defined as the effort of the company to minimize tax payments using aggressive tax planning activities and tax avoidance. Tax aggressiveness refers to the tax planning activities, which may be legal, illegal or fall into a grey area”.

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa agresivitas merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan menggunakan kegiatan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak. Selain itu, agresivitas pajak mengacu pada kegiatan perencanaan pajak yang mungkin legal, ilegal, atau jatuh ke area abu-abu.

2.1.5.8 Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Kartikasariari dan Martani (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan 5 (lima) pengukuran, di antaranya:

Tabel 2.1

Pengukuran Agresivitas Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	<i>ETR</i>	$ETR_{it} = \frac{Total\ Tax\ Expense_{it}}{Pretax\ Income_{it}}$
2	<i>Cash ETR</i>	$CETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pretax\ Income_{it}}$

3	<i>Book Tax Differences Manzon- Plesko</i>	$BTD_MP_{it} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{Total\ Asset_{it-1}}$
4	<i>Book Tax Differences Desai- Dharmapala</i>	$BTD_DD_{it} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$
5	<i>Tax Planning</i>	$Tax\ Plan_{it} = \frac{\sum_t^{t-2} [PTI * 28\% - Current\ portion\ of\ Total\ expense] : 3}{Ending\ Asset_{it}}$

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *ETR* sebagai indikator agresivitas pajak. Richardson dan Lanis (2012) dalam penelitiannya menggunakan *ETR* untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan *ETR* untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai *ETR* mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. *ETR* digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al., 2009 dalam Kartikasari dan Martani, 2010).

2.1.5.9 Effective Tax Rate (ETR)

Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* pada dasarnya adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan oleh investor, manajer dan pemegang saham sebagai instrumen untuk membuat kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan karena tarif pajak efektif memberikan statistik ringkasan yang mudah digunakan dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Kern dan Morris, 1992 dalam Mourikis, 2016).

Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Halperin, 2005 dalam Wulandari, 2016). Tarif Pajak Efektif pada dasarnya menilai kinerja pajak perusahaan. Jadi, ini adalah ukuran terbaik untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan yang sebenarnya (Noor et al., 2010).

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Hanum (2013), tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan.

Pricewater Coopers (PWC) (2011) merumuskan tarif pajak efektif sebagai pajak penghasilan terhutang dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Sementara itu Xing dan Shunjun (2007) dalam Hanum (2013) mendefinisikan tarif pajak efektif sebagai rasio (dalam persentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total laba sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar persentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Rumus untuk menghitung *ETR* menurut Rist dan Pizzica (2014:54) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Pretax\ Income}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas perusahaan yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga investorpun akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Sudiarta,2017). Menurut Islahuddin (2015) shareholders yang sudah menanamkan dananya di perusahaan dengan sendirinya akan berusaha melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tersebut.

Dalam hubungan keagenan, manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Strategi yang dilakukan

untuk meminimumkan asimetri informasi, adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Dinah dan Darsono, 2017). Menurut Indriawati (2017), pengawasan yang semakin ketat dari para investor dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menekan tindakan agresivitas pajak.

Uraian di atas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luke dan Zulaikha (2016) dan Napitu dan Kurniawan (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga dari hutang tersebut. Pada peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang.

Secara logika, semakin besar nilai dari rasio *leverage*, artinya semakin meningkat pula jumlah pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya bunga yang disebabkan dari utang tersebut. Biaya bunga yang meningkat dapat menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Kurniasih

dan Sari, 2013). Rahmawati (2017) menyatakan bahwa diperkirakan Wajib Pajak cenderung menggunakan leverage yang tinggi untuk dapat meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan. Penelitian Ozkan (2001) dalam Agustina (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Jika dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajaknya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Noor, et al.,(2010) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate (ETR)* yang lebih rendah dan agresivitas pajak akan meningkat karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Uraian diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Djeni Indrajati (2017) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk asset dan kewajiban lancarnya (Subramanyam, 2013:10). Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang baik dengan arus kas yang lancar. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Sehingga perusahaan akan mampu melaksanakan kewajiban pajak yang dimilikinya dalam suatu periode berjalan. Penelitian oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah.

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil–hasil sebelumnya dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M. Fadzillah dan Noe'Azam Mastuki (2010)	<i>Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies.</i>	<i>Size, ROA, leverage, capital intensity dan inventory intensity</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ETR.	Noor et al. melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 1993-2000, sementara pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> yang terdapat di BEI periode 2012-2016.
2.	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono	Likuiditas, Leverage, Komisaris	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak,	Penelitian dilakukan pada perusahaan

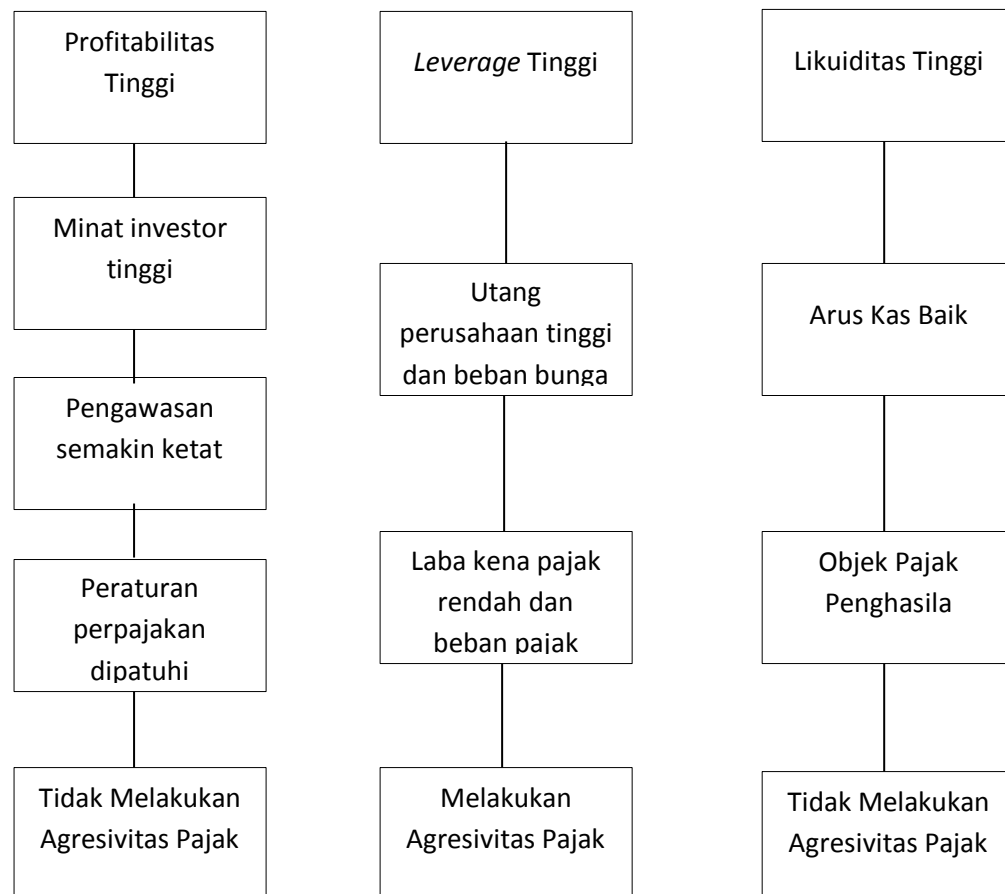
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
	(2012)	Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara leverage dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	manufaktur tahun 2006-2010 sementara penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverage pada periode 2012-2016.
3.	Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital</i> <i>Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax</i> <i>Rate</i>	Ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, sementara profitabilitas, <i>leverage</i> , dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.	Jumlah populasi dalam penelitian Ardyansah adalah selama 2 tahun sedangkan penulis menggunakan populasi selama 5 tahun.
4.	Ardisamartha dan Noviri (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas	Likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, sementara leverage dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat	Ardisamartha menggunakan <i>debt</i> <i>to total assets</i> sebagai indikator <i>leverage</i> , sementara penelitian ini menggunakan <i>debt</i> <i>to equity</i> sebagai

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
		Wajib Pajak Badan	agresivitas wajib pajak badan.	indikator <i>leverage</i> .
5.	Tiaras dan Wijaya (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Likuiditas, Leverage, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Penelitian Tiaras menggunakan <i>debt to total assets</i> sebagai indikator <i>leverage</i> , sementara penelitian ini menggunakan <i>debt to equity</i> sebagai indikator <i>leverage</i> .
6.	Luke dan Zulaikha (2016)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	CSR dan Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Luke melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor <i>food and</i>

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
				<i>beverage</i> tahun 2012-2016.
7.	Scania Evana Putri (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Leverage</i> dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, sementara profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.	Scania melakukan penelitian pada perusahaan transportasi sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> .
8.	Napitu dan Kurniawan (2016)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Napitu melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> tahun

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
				2012-2016.
9.	Djeni Indrajati W, dkk (2017)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Leverage, likuiditas, capital intensity, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Indrajati melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor <i>food and beverage</i> tahun 2012-2016.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

H_1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

H_2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

H_3 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.